DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PARIWISATA TERHADAP PEMINGGIRAN PENDUDUK TEMPATAN KASUS PULAU BINTAN *

H Azirwan **

Abstract: Bintan Island as economic cooperation zone between Indonesia-Singapore has experience fast development. Until now, industrial and tourism zone has cost billions of Singapore dollars and absorb thousands of workers. Development in Bintan Island has impact to the community; including population grows of 3.09% per year and multi ethnics that live in Bintan Island. Other impact is marginalizing process of local community that has lost in competition with immigrants. Main cause of the marginalization is poverty, from many aspects, and it is multi dimension of social phenomenon such as economy, structural, psychology, and cultural.

Keywords : development, tourism, industry, Bintan Island, marginalization, local community

Pendahuluan

Pulau Bintan merupakan satu diantara pulau yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau. Pulau Bintan telah dijadikan kawasan kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak pada tanggal 28 Agustus 1990. Kerjasama ekonomi tersebut antara lain meliputi penggunaan tanah seluas 64.000 hektar dengan peruntukan bagi kawasan pariwisata terpadu seluas 23.000 hektar, kawasan industri terpadu seluas 4.000 hektar dan kawasan pengembangan sumber air seluas 37.000 hektar.

Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura di Pulau Bintan dilaksanakan atas prinsip yang saling menguntungkan berdasarkan filosofi untuk memanfaatkan keunggulan komperatif yang ada bagi Singapura dan Provinsi Riau. Singapura memiliki keunggulan seperti: pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, wisatawan asing yang datang ke Singapura cukup banyak, memiliki manajerial *skill* yang memadai, menguasai teknologi tinggi di bidang industri, memiliki modal swasta yang besar, pengalaman dalam kerjasama internasional, serta memiliki pusat pelatihan yang memadai. Disamping itu, Singapura memiliki

kelemahan seperti terbatasnya sumber alam, terbatasnya tenaga kerja, dan sumber air. Sedangkan bagi Provinsi Riau khususnya Pulau Bintan memiliki keunggulan komperatif seperti: memiliki potensi sumber alam khususnya untuk kegiatan pariwisata dan industri, memiliki sumber air yang cukup, tenaga kerja potensial dengan tingkat upah relatif rendah, memiliki kebudayaan tradisional, pengalaman dalam membangun dan stabilitas keamanan yang mantap (TKKPR, 1999).

Pembangunan kawasan industri dan pariwisata di Pulau Bintan sebagai bagian dari kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura telahpun dimulai. Tanah yang dicadangkan untuk kawasan industri seluas 40.465.237 M2 sampai dengan akhir tahun 1998 telah dibebaskan (diganti rugi) seluas 38.927.023 M2 (96,25%) tanah yang belum dibebaskan seluas 1.518.214 M2 (3,75%). Realisasi penggunaan tanah yang telah dibangun sebagai tapak industri adalah seluas 3.500.000 M2, terdiri dari industri garment 13 buah, industri elektronik 14 buah, dan industri slop beton 1 buah. Proyek ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 6,302 orang dan telah menelan investasi sebesar Sin \$ 1.05 Milyar.

Pencadangan tanah untuk kawasan pariwisata seluas 201.455.563 M², sampai dengan akhir tahun 1998 telah dibebaskan (diganti rugi) seluas 275.302.086 M² (87,02%), dan tanah yang belum dibebaskan seluas 26.153.477 M². Sedangkan realisasi penggunaan tanah (yang telah dibangun) adalah seluas 35.000.000 M², terdiri dari 7 buah hotel berbintang dengan jumlah kamar 552 buah, 2 buah vila masing-masing dengan 100 kamar, 1 buah lapangan golf 36 hole, dan 2 buah lapangan golf 18 hole. Proyek ini telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 4.323 orang dan asing sebanyak 128 orang. Pada tahun 1998 kunjungan wisatawan asing ke kawasan pariwisata tersebut berjumlah 251.095 orang, dan telah menelan investasi sebesar Sin \$ 1.80 Milyar (Dinas Pariwisata Kab. Kepri, 1999).

Masyarakat Provinsi Riau (khususnya Pulau Bintan) dapat digolongkan sebagai sebuah masyarakat majemuk karena terdiri atas sejumlah suku dan golongan etnik yang hidup berdampingan dan masing-masing mempertahankan identitas sosial budayanya. Walaupun demikian masing-masing suku dan etnik saling berhubungan, berbaur, dan saling mempengaruhi. Golongan-golongan suku dan etnik yang ada di Pulau Bintan adalah: Melayu, Minang Kabau, Jawa, Batak, Flores, Bugis, Madura, dan keturunan Cina (Parsudi Suparlan, 1986). Walaupun masyarakat Provinsi Riau ini bercorak majemuk, tetapi masyarakat tersebut lebih dikenal sebagai masyarakat orang melayu yang berkebudayaan Melayu. Hal ini disebabkan karena wilayah Provinsi Riau adalah tanah asalanya orang melayu. Dari catatan sejarah diketahui bahwa orang melayu adalah penduduk yang pertama kali menghuni wilayah ini (Suwardi, 1985).

Manusia Melayu pada umumnya suka hidup secara sederhana dan banyak bergantung kepada alam dengan menciptakan atau menggunakan teknologi yang terbatas. Orang Melayu kurang memiliki jiwa perjuangan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam

menjalani hidup pada umumnya secara sederhana yang terlihat dari sikapnya kepada orang lain dan reaksi terhadap keadaan alam sekelilingnya. Manusia Melayu selalu merendahkan diri, tidak mau menonjolkan dirinya dan tidak mau memaksakan kemauannya jika kemauan tersebut bertentangan dengan kemauan orang lain serta senantiasa bersedia berkompromi. Sikap Melayu yang demikian memberikan kesempatan kepada golongan etnis lain untuk memimpin kelompok manusia Melayu (Tabrani, 1986).

Penduduk Pulau Bintan pada tahun 1998 berjumlah 186.383 orang atau 40.361 kepala keluarga. Proporsi penduduk Pulau Bintan terhadap penduduk Kabupaten Kepulauan Riau adalah sebesar 34,97%. Bila disimak tabel 2 terdapat bahwa kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura di Pulau Bintan telah menyebabkan pertumbuhan penduduk di kawasan ini yaitu dengan rata-rata 3,09% pertahun. Angka pertumbuhan ini ternyata lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Riau yaitu rata-rata 2,11% pertahun.

2. Proses Peminggiran

Pembangunan Pulau Bintan sebagai kawasan industri dan pariwisata yang merupakan bahagian kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura telah mengakibatkan terjadinya proses peminggiran (marginalisasi) bagi penduduk tempatan. Mengikuti Pulin Nayak (1995) terdapat berbagai-bagai bentuk peminggiran yang dialami oleh golongan miskin. Hal ini termasuklah makna peminggiran daripada pendidikan, perumahan, pemilikan harta, penyertaan demokrasi, kemudahan fasilitas, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Akhir dari sebuah proses daripada kegiatan tersebut adalah munculnya wujud peminggiran yang membawa kepada suatu bentuk dan fenomena kemiskinan dalam masyarakat.

Tomlinson (1986) membincangkan bahwa beberapa bentuk dan jenis Olah raga

masa kini amatlah mahal dan tidak fleksibel. Misalnya olah raga squash, tenis, golf, dan sebagainya. Banyak orang yang tidak mampu untuk mendapatkan *leisure (waktu luang)* dalam bentuk olah raga yang mahal ini. Di samping itu, adanya perkumpulan atau organisasi olah raga dan kebudayaan yang eksklusif dan mengenakan bayaran keahlian yang tinggi merujuk kepada keadaan yang lebih spesifik. Dengan ini golongan yang kurang berada (mampu) akan mengalami kekurangan pemanfaatan waktu luang mereka dan ini akan membawa banyak kesan buruk kepada kesehatan mereka. Secara tidak langsung, bentuk-bentuk olah raga yang mahal pada hari ini turut menyingkirkan golongan yang serba kurang khususnya kurang dalam hal pendapatan daripada mendapatkan pemanfaatan waktu luang yang mencukupi.

Skop peminggiran lebih meluas dalam konteks masyarakat moderen termasuklah aspek mobilitas sosial dalam masyarakat. Soal pemanfaatan waktu luang, komunikasi, kepengurusan administrasi keuangan, penyertaan dalam organisasi politik, dan sebagainya. Dalam hal ini peminggiran adalah merujuk kepada situasi atau ketidakmampuan seseorang untuk turut serta menikmati beberapa aspek kehidupan moderen yang telah diakui oleh masyarakat sebagai norma atau tahap kehidupan yang mencukupi. Ketidakmampuan tersebut merupakan keadaan kekurangan yang menyebabkan mereka terpinggirkan atau *ter-ketepi* daripada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, kekurangan dan peminggiran mempunyai kaitan yang rapat dengan kemiskinan (Mohd. Taib dan Razali, 1998).

William (1986) mengatakan bahwa golongan yang dinafikan hak sosial mereka oleh pemerintah akan mewujudkan satu pembahagian kelompok yang berbeza dari keseluruhan penduduk. Seterusnya nanti kelompok ini kan terpinggir daripada menerima penitisan atau kesan ekonomi di sekeliling mereka. Ini bermakna kekurangan yang dialami berpuncak daripada peminggiran

sosial yang akan mendorong berlakunya kemiskinan.

3. Peminggiran Sebagai Akibat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya peminggiran penduduk tempatan sebagai akibat pembangunan kawasan industri dan pariwisata di Pulau Bintan. Kemiskinan sebagai fenomena sosial tidak saja berdimensi ekonomi akan tetapi juga berdimensi struktural, psikologis, dan kultural.

Bila dilihat dari dimensi ekonomi terdapat dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti: Kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikaitkan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Misalnya membandingkan proporsi pendapatan yang diterima oleh sekelompok tertentu dengan kelompok sosial lainnya (Alfian, 1980; Mely, 1980; Selo, 1980). Menurut Moeljarto (1993) kemiskinan bukan saja merupakan masalah yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan (*Welfare*), tetapi mengandung beberapa alasan yaitu:

Pertama, masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan (*vulnerability*). Pembangunan infrastruktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan pendapatan petani, akan tetapi musim kering, kemarau panjang, dan banjir dapat saja menurunkan tingkat hidupnya sampai titik yang terendah.

Kedua, kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk

berpartisipasi dalam proses produksi, atau mereka terperangkap dalam hubungan produksi yang eksploitatif yang menuntut kerja keras dalam jam kerja yang panjang dan dengan imbalan yang rendah.

Ketiga, kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elite desa dan birokrat yang menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran.

Keempat, kemiskinan berarti menghabiskan semua atau sebahagian terbesar penghasilannya untuk konsumsi makanan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang mengakibatkan produktifitas, ketahanan fisik, dan semangat kerja menjadi rendah.

Kelima, kemiskinan yang ditandai dengan tingginya rasio ketergantungan, karena besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih balita. Hal ini akan berpengaruh kepada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka, sehingga anak-anak dari keluarga miskin akan kalah berkompetisi dalam merebut peluang dan sumber-sumber dalam masyarakat.

Keenam, budaya miskin yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Penghapusan *physical poverty* tidak secara otomatis dapat menghapus *culture of poverty*. Budaya kemiskinan yang diwariskan secara antar generasi cenderung menghambat motivasi untuk melakukan perubahan kepada keadaan yang lebih baik (Oscar, 1968).

4. Penutup

Tanah yang dimiliki penduduk di sekitar kawasan yang dikembangkan sebagai tapak pembangunan industri dan pariwisata di Pulau Bintan telah beralih hak penguasaannya

melalui cara ganti rugi oleh perusahaan pengembang (Intermatrix, 1986). Pembebasan tanah untuk keperluan swasta harus dilakukan secara langsung antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi yang berpedoman kepada asas musyawarah melalui atau tidak melalui bantuan panitia (Effendi, 1994).

Selanjutnya Riwanto (1994) menyatakan bahwa salah satu konsekuensi dari keputusan menjadikan daerah Riau Kepulauan khususnya Pulau Bintan sebagai lokasi investasi industri dan pariwisata adalah terbukanya peluang kerja di daerah ini bagi pencari kerja, baik dari daerah Riau Kepulauan sendiri maupun dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Masalahnya keputusan itu tidak secara jelas didasari pertimbangan yang mempunyai persentuhan langsung dengan kepentingan penduduk Riau Kepulauan sendiri. Meskipun salah satu *Comparative Advantage* yang diperoleh daerah Riau Kepulauan dengan adanya kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura di Pulau Bintan tersebut adalah melimpahnya tenaga kerja yang bisa diupah rendah, namun dalam kenyataannya kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sama sekali tidak mempertimbangkan potensi sumber daya penduduk setempat (lokal) yang ada. Apa yang terjadi kemudian, adalah berlangsungnya proses peminggiran (marginalisasi) penduduk setempat oleh para pendatang yang memiliki kualifikasi kerja yang diperlukan. Orang Melayu Riau Kepulauan khususnya yang mendiami Pulau Bintan tampaknya telah ditakdirkan menjadi saksi dari berbagai perubahan yang selalu melintas di wilayah mereka.

Daftar Kepustakaan

- Alfian, Mely G T & S Sumardjan. 1980. *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. YIIS, Jakarta.
- Anwar, E & S Hadi. 1996. "Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan". *Prima Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, Edisi 25 tahun (1971-1996) Tahun*

- XXV 1996, LP3ES, Jakarta. pp. 49-62
- Conyers, D. 1994. *Perancangan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, (terjemahan — oleh Susetiawan, Affan Gafar (Ed)), Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Riau. 1999. *Kerjasama Ekonomi Terpadu di Pulau Bintan dan Karimun*, Tanjungpinang.
- Friedman, J. 1964. "Regional Planning as A Field of Study", dalam Friedman, J & W Alonso, *Regional Development and Planning*, MIT Press Cambridge, Mass.
- Hasan, A A G. 1997. *Industri, Migrasi Penduduk dan Perubahan Demografi Masyarakat Bandar dan Luar Bandar di Kedah Darul Aman*. Dalam Mohd. Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin (Editor). *Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Malaysia*, diterbitkan oleh Unit Penerbitan Jabatan Antropologi dan Sosiologi Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Latief, D. 1997. "Pemerataan Pembangunan Melalui Program Pengembangan Wilayah Terpadu." Prosiding Seminar MPMN, Tanjungpinang.
- Mantra IB & Mollo. 1987. *Migrasi Penduduk ke Kota-kota Besar di Indonesia*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas GadjahMada, Yogyakarta.
- Perangin, E. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, E. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Susanto, A S. 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Tomlinson, A. 1986. *Playing away from home: leisure, disadvantage and issues of income and acces* dalam P. Golding (editor), *Excluding The Poor*, CPAG, England.
- Warterson, A. 1965. *Development Planning: Lesson Of Experience*, John Hopkins Press, Baltimore.